

TAHUN 2018 - 2023



Rencana Strategis (RENSTRA)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jateng
gayeng

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menyusun Renstra tahun 2018 – 2023, yang mencakup Pendahuluan; Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; serta Penutup. Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk kurun waktu lima tahun 2018 – 2023.

Dengan demikian, semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19591202 198203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	II-20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD.....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....	III-10
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	III-10
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	VI-1
6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	VI-4
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Jateng Menurut Struktur Bidang...	6
Tabel 2.2.	Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Jateng Menurut Pendidikan.....	6
Tabel 2.3.	Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Jateng Menurut Pangkat	7
Tabel 2.4.	Jumlah Aset Badan Kesbangpol Prov. Jateng Tahun 2013-2017	8
Tabel 2.5.	Frekuensi Unjuk Rasa di Jawa Tengah Menurut Kelompok Pelaku..	10
Tabel 2.6.	Frekuensi Unjuk Rasa di Jateng Menurut Tuntutan.....	10
Tabel 2.7.	Jumlah Tindak Pidana yang tertangani di Provinsi Jawa Tengah	11
Tabel 2.8.	Jumlah Orang Asing Pendetang di Provinsi Jawa Tengah	11
Tabel 2.9.	Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2018	12
Tabel 2.10.	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2013-2018	13
Tabel 2.11.	Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012- 2018	13
Tabel 2.12.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2011-2017	13
Tabel 2.13.	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	14
Tabel 2.14.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	15
Tabel 2.15.	Gambaran Kinerja Pelayanan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	18
Tabel 2.16.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah 2014-2018	19
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	2
Tabel 3.2.	Usulan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2013	6
Tabel 3.3.	Telaah Visi, Misi dan Program KDH.....	7
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	2
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Urusan Kesekretariatan	3
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	3
Tabel 5.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Kesekretariatan.....	4
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	1
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	1



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

NIP : 19591202 198203 1 005

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Berdasar SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/205/2012 tanggal 02 Maret 2012.

Bertugas untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 160 Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2018-2023 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2019
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19591202 198203 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disingkat -Badan Kesbangpol- tetap sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Gubernur Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum. Sekaligus sebagai konsekuensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, fungsi perlindungan masyarakat beralih dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan lima tahun (2018-2023). Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini merupakan salah satu bentuk

penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Hal tersebut diatas merupakan suatu bentuk upaya nyata dalam melaksanakan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah, yaitu : ***Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***”, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah, terutama misi ke - 1, yaitu : ***Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia***; dan misi ke - 4, yaitu : ***Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan***.

Di samping itu, agar penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Jawa Tengah dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan nasional, penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri; Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah Penyesuaian indikator dan target kinerja dalam rangka menjabarkan visi dan misi Gubernur, yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, yaitu : “**Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, ke dalam visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan visi dan misi kepala daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

2. Mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah di urusan ketentraman dan ketertiban umum dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra); Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah; Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra K/L; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS; serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang disertai dengan indikator kinerja targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melalui metode analisis SWOT yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya,

sehingga penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat Daerah. Selain IKU Perangkat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program.

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan kesatuan bangsa dan politik masuk pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan OPD atau OPD pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tetap merupakan OPD Provinsi Jawa Tengah di bawah Gubernur Jawa Tengah, sampai dengan peraturan tersebut diatas di undangkan. Hal ini menyebabkan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berpayung pada dua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2016 dan Perda Jateng Nomor 7 Tahun 2008 sebagai dasar pelaksanaan tupoksi, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

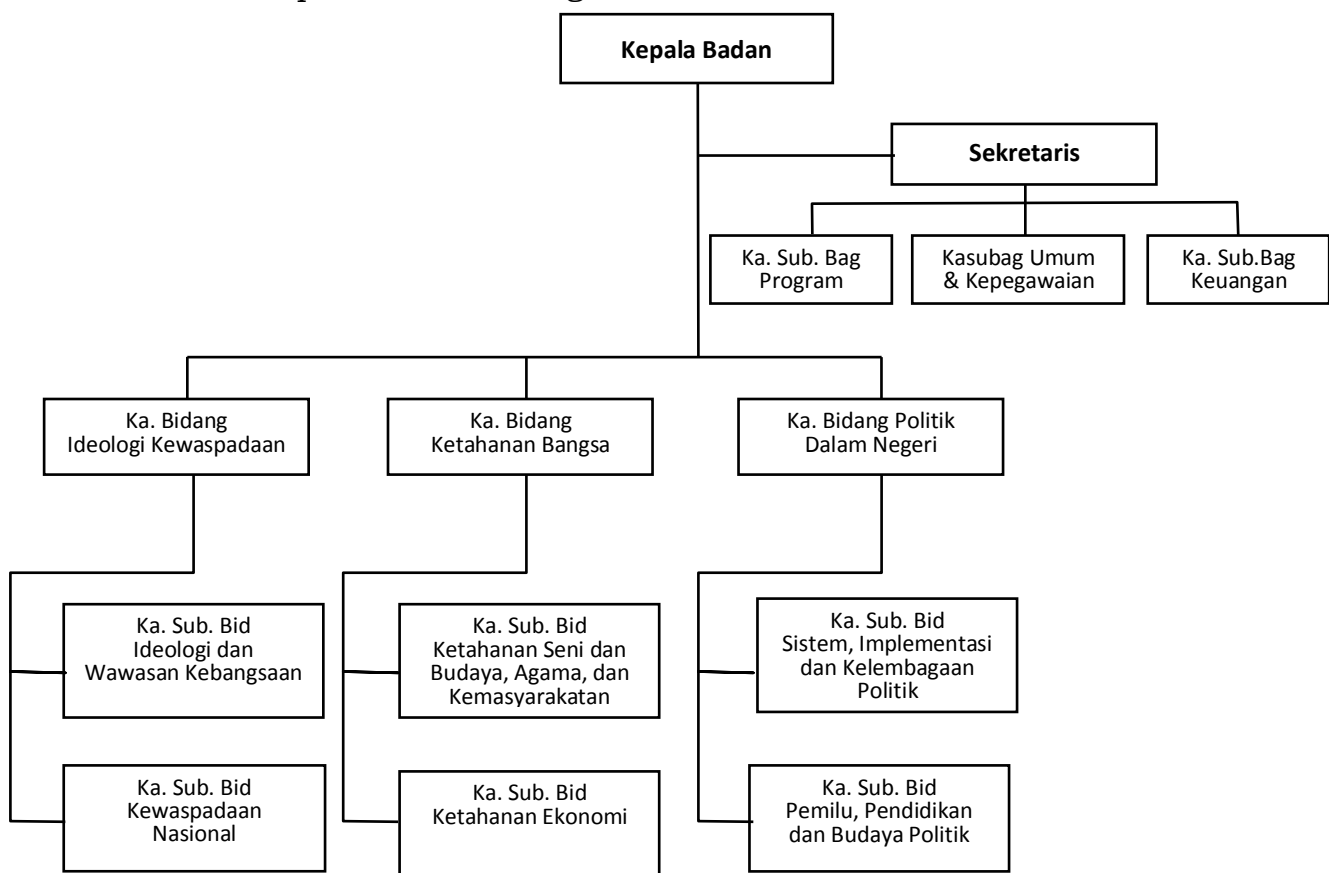
Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa dan politik dalam negeri lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menurut PP. Nomor 18 Tahun 2016 dan Perda Nomor 9 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Masyarakat;
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
 2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng, 2018

Adapun uraian tugas pokok sekretariat, masing-masing bidang, dan sub bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- a. Tugas :
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum, dan kepegawaian.
- b. Fungsi :
 - 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program.
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.
 - 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

1. Sub bagian Program
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi:
koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan.
2. Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Badan.

2. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan

- a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional.
- b. Fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan membawahkan :

- 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah bangsa dan penghargaan kebangsaan.
- 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing.

3. Bidang Ketahanan Bangsa

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama, kemasyarakatan, dan ketahanan ekonomi.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Bangsa membawahkan :

- 1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik, pemilu, pendidikan dan budaya politik.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemilu, pendidikan dan budaya politik.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan :

1) Sub Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik, meliputi : pelaksanaan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang sistem, implementasi, kelembagaan politik dan pemerintahan, serta kelembagaan partai politik.

2) Sub Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemilu, pendidikan dan budaya politik, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan, fasilitasi, pengawasan dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang sistem dan implementasi pemilu, pilpres, pemilukada, pendidikan dan budaya politik.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

a) Jumlah dan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sampai bulan Agustus 2018 sebanyak 98 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 70 orang pegawai negeri sipil (PNS), 18 orang tenaga kontrak dan 10 Orang Harlep. Dari

98 orang pegawai tersebut, sebanyak 56 orang laki-laki dan 42 orang perempuan.

Tabel 2.1
Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Jateng
Menurut Struktur dan Bidang

Bidang dan Bagian	Jumlah
Kepala Badan	1
Sekretaris	1
1. Sub Bagian Program	6
2. Sub Bagian Keuangan	10
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	16
Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan	-
1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	7
2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.	8
Kepala Bidang Ketahanan Bangsa	1
1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	4
2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi	6
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	1
1. Sub Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik	4
2. Sub Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik	5

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2018

b. Status Pendidikan dan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 70 orang PNS yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 15 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 35 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), tidak ada pegawai yang berpendidikan Diploma III, 19 orang berpendidikan SLTA, 1 orang berpendidikan SLTP, dan tidak ada pegawai berpendidikan SD.

Tabel 2.2
Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Jateng
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	15
Strata 1	35
Diploma 3	-
SLTA	19
SLTP	1
SD	-
Total	70

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2018

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 70 orang PNS, terdiri dari Golongan II 9 orang; Golongan III 49 orang; Golongan IV 12 orang;

Tabel 2.3
Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Jateng
Menurut Kepangkatan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	GOLONGAN II	18	17	17	15	11	9
1	II/a	8	5	5	2	1	-
2	II/b	4	5	5	6	4	3
3	II/c	4	5	5	5	4	5
4	II/d	2	2	2	2	2	1
B	GOLONGAN III	79	75	74	66	50	49
5	III/a	12	5	5	3	3	2
6	III/b	26	32	32	31	21	15
7	III/c	13	12	12	13	6	8
8	III/d	28	26	25	19	20	24
C	GOLONGAN IV	8	13	13	14	13	12
9	IV/a	4	8	8	9	8	8
10	IV/b	3	4	4	4	4	3
11	IV/c	1	1	-	-	-	-
12	IV/d	-	-	1	1	1	1
D	TOTAL	105	105	104	95	74	70
E	KETERANGAN						
13	Pensiun	8	7	-	-	11	4
14	Mutasi Keluar	1	1	-	12	1	-
15	Mutasi Masuk	-	-	3	-	4	2
16	Meninggal	-	-	1	-	2	2

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2018

2.2.2 Aset/Modal OPD

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari :

Tabel 2.4
Jumlah Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017

KODE BARANG	NAMA BIDANG BARANG	TAHUN										
		2013		2014		2015		2016		2017		
		JMLH	NILAI	JMLH	NILAI	JMLH	NILAI	JMLH	NILAI	JMLH	NILAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
A	TANAH											
1	Tanah	2	11.786.143.000	2	11.786.143.000	2	11.786.143.000	2	11.786.143.000	2	11.786.143.000	
B	PERALATAN MESIN											
2	Alat-Alat Besar	0	0	0	0	1	640.150.000	1	640.150.000	1	640.150.000	
3	Alat-Alat Angkut	33	2.034.021.464	37	2.530.313.464	43	3.072.943.464	43	3.072.943.464	28	2.911.381.900	
4	Alat-Alat Bengkel	17	85.700.000	17	85.700.000	17	85.700.000	17	85.700.000	17	85.700.000	
5	Alat-Alat Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Alat Kantor dan RT	1.466	3.218.887.279	1.562	3.603.362.279	1.738	4.326.247.279	1.867	5.036.017.279	1.865	2.134.204.209	
7	Alat Studio & Komunikasi	103	1.468.0056.000	103	1.468.0056.000	175	1.858.985.000	178	1.910.905.000	178	1.910.905.000	
8	Alat Kedokteran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Alat Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Alat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	GEDUNG DAN BANGUNAN											
11	Bangunan Gedung	4	5.518.952.875	4	5.518.952.875	5	5.563.661.875	5	5.563.661.875	5	5.563.661.875	
12	Bangunan Monumen	2	101.650.000	2	101.650.000	2	101.650.000	2	101.650.000	2	101.650.000	
D	JALAN, IRIGASI & JARGN											
13	Jalan Jembatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Bangunan Air / Irigasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Instalasi	2	111.870.000	2	111.870.000	2	111.870.000	2	111.870.000	2	111.870.000	
16	Jaringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	ASET TETAP LAINNYA											
17	Buku Perpustakaan	943	70.535.800	1.019	77.125.800	1.061	80.619.400	1.061	80.619.400	1.061	80.619.400	
18	Brg Bercorak Kesn/Kebdy	4	1.550.000	4	1.550.000	4	1.550.000	4	1.550.000	4	1.550.000	
19	Hewan Ternak & Tmbhn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	KONSTRUKSI DLM PGRJN											

KODE BARANG	NAMA BIDANG BARANG	TAHUN										
		2013		2014		2015		2016		2017		
		JMLH	NILAI	JMLH	NILAI	JMLH	NILAI	JMLH	NILAI	JMLH	NILAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
20	Bangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bangunan Monumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	2.576	24.397.315.418	2.752	25.284.672.418	3.050	27.629.520.018	3.182	28.391.210.018	3.165	28.327.835.384	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dapat dijabarkan dari 3 aspek penilaian yang terdiri dari Kondusifitas Wilayah; Politik dan Demokrasi; serta Pembinaan Ormas, LSM dan OKP, dengan penjabaran sebagai berikut :

a) Kondusifitas Wilayah

Secara umum situasi daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018 aman dan tertib. Meskipun masih terjadi beberapa kali gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Kejadian unjuk rasa mengalami fluktuasi, pada tahun 2013 s/d 2018, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta masih adanya paham keagamaan radikal dan aliran sesat di masyarakat.

Tabel 2.5
Frekuensi Unjuk Rasa di Jawa Tengah Menurut Kelompok Pelaku

No	Kelompok Massa	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Guru	0	0	1	0	0	1	0
2	Mahasiswa	167	109	99	240	34	71	22
3	Buruh	73	89	67	117	48	57	33
4	Masyarakat	251	240	207	46	81	150	22
5	Warga Desa	0	0	0	0	50	0	29
6	Ormas/Parpol	0	0	0	0	112	0	47
Jumlah		491	438	374	403	325	279	153

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2018

Tabel 2.6
Frekuensi Unjuk Rasa di Jawa Tengah Menurut Tuntutan

No	Tuntutan	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ideologi	0	0	0	0	0	0	0
2	Politik	4	290	279	226	5	4	2
3	Ekonomi	73	20	62	127	71	51	37
4	Sosbud	378	7	4	35	202	201	105
5	Hukum dan HAM	36	121	29	15	37	11	4
6	Pendidikan	0	0	0	0	2	12	1
7	Kesehatan	0	0	0	0	8	0	4
Jumlah		491	438	374	403	325	279	153

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2018

Di samping itu, tingkat kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak pidana (*crime total*) sebanyak 102.209 kasus yang terdiri dari curat, curas, curanmor, pembakaran, penganiayaan, pembunuhan, uang palsu, narkoba, kenakalan remaja dan pemerkosaan.

Tabel 2.7
Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani
di Provinsi Jawa Tengah 2012-2018

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Kinerja Penyelesaian Tindak Pidana
		Lapor	Selesai	
1	2012	19.094	12.039	63,05
2	2013	17.444	10.905	62,51
3	2014	15.747	9.794	62,19
4	2015	15.245	9.771	64,09
5	2016	13.425	9.176	68,35
6	2017	11.420	8.489	74,33
7	2018	9.834	7.251	73,73
J U M L A H		102.209	67.425	65,96

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2018

Sementara itu, sepanjang 2011-2018, tercatat fluktuasi jumlah orang asing di Jawa Tengah. Mayoritas dari mereka adalah tamu serta tenaga kerja asing.

Tabel 2.8
Jumlah Orang Asing Pendatang di Provinsi Jawa Tengah

No	Keterangan	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Corp Diplomatik	215	89	106	164	234	94	89
2	Tamu Asing	10.017	14.747	13.052	9.491	5.324	1.765	2.687
3	Riset Asing	36	17	7	14	2	5	3
4	Shooting Film/artis Asing	31	25	6	10	10	85	77
	Jumlah kali	10.299	14.878	13.171	9.679	5.570	1.949	2.856
1	Wartawan Asing	2	-	2	-	89	20	-
2	Tenaga kerja asing	1.057	1.676	1.923	2.133	2.084	2.257	2.526
3	Atlet Asing	80	16	16	16	16	16	-
	Jumlah orang	1.139	1.692	1.941	2.149	2.189	2.293	2.526

Sumber : Kanwil Kemenkumham Jateng, 2018

Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Jawa Tengah dari berbagai gatra pembangunan dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Nasional untuk mengukur ketahanan daerah, yang didalamnya terdapat 8 gatra, 37 aspek, 108 variable dan 821 indikator dari berbagai aspek pembangunan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Indeks Ketahanan Nasional (IKN)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Gatra	Tahun									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Geografi	2,83	Cukup Tangguh	2,49	Kurang Tangguh	2,63	Cukup Tangguh	2,81	Cukup Tangguh	2,81	Cukup Tangguh
2	Demografi	3,16	Cukup Tangguh	3,16	Cukup Tangguh	3,12	Cukup Tangguh	3,13	Cukup Tangguh	3,09	Cukup Tangguh
3	Sumber Kekayaan Alam	2,66	Cukup Tangguh	2,66	Cukup Tangguh	2,65	Cukup Tangguh	2,63	Cukup Tangguh	2,63	Cukup Tangguh
4	Ideologi	2,97	Cukup Tangguh	2,97	Cukup Tangguh	2,61	Cukup Tangguh	2,58	Cukup Tangguh	2,58	Cukup Tangguh
5	Politik	3,13	Cukup Tangguh	3,08	Cukup Tangguh	2,94	Cukup Tangguh	3,03	Cukup Tangguh	3,03	Cukup Tangguh
6	Ekonomi	2,94	Cukup Tangguh	2,91	Cukup Tangguh	2,62	Cukup Tangguh	2,74	Cukup Tangguh	2,75	Cukup Tangguh
7	Sosial dan Budaya	2,73	Cukup Tangguh	2,80	Cukup Tangguh	2,96	Cukup Tangguh	3,01	Cukup Tangguh	3,01	Cukup Tangguh
8	Pertahanan & Keamanan	2,50	Kurang Tangguh	2,76	Cukup Tangguh	2,78	Cukup Tangguh	3,08	Cukup Tangguh	3,08	Cukup Tangguh
Skor IKN		2,85	Cukup Tangguh	2,86	Cukup Tangguh	2,80	Cukup Tangguh	2,89	Cukup Tangguh	2,89	Cukup Tangguh
Skor Nasional		2,71	Cukup Tangguh	2,75	Cukup Tangguh	2,67	Cukup Tangguh	2,76	Cukup Tangguh	2,77	Cukup Tangguh
Peringkat		4		5		4		4		5	

Sumber : Labkurtannas Lemhanas, 2018

b) Politik dan Demokrasi

Kondisi politik di Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilukada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Partisipasi pemilih dalam perhelatan pemilu memiliki kecenderungan yang serupa di tingkat nasional, yang terus menurun.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 sebesar 58,46% turun menjadi 55,64% pada tahun 2013, namun mengalami peningkatan yang cukup drastis sebesar 73,19%. Selanjutnya untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di kabupaten/kota selama kurun waktu tahun 2013-2018, tertinggi adalah Kota Salatiga 82,80% dan terendah Kabupaten Brebes 55,40%, sedangkan angka rata-rata di Jawa Tengah sebesar 69,96%. Pada tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih Pileg DPR/DPRD sebesar 74% dan Pilpres sebesar 71,25%.

Tabel 2.10
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2013-2018

No	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-Rata)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pilkada Kabupaten/Kota	64,40	-	68,54	-	79,79	<u>77,40</u>
2	Pilgub dan Wagub	55,64	-	-	-	-	<u>73,19</u>
3	Pileg DPR/DPRD	-	74,00	-	-	-	=
4	Pilpres dan Wapres	-	71,25	-	-	-	=

Sumber : KPU Prov. Jateng, 2018

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana Tabel 2.9:

Tabel 2.11
Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018

No	Kegiatan	Tahun (Kegiatan)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendidikan politik bagi elemen masyarakat	6	3	5	11	7	7	16
2	Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol	4	3	3	5	5	5	5
3	Penguatan budaya dan etika politik masyarakat	4	3	3	5	5	8	9
JUMLAH		17	14	11	21	17	20	30

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2018

Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan kelembagaan demokrasi (*democratic institution*), terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Pencapaian skor IDI Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari 63,79 menjadi 70,85. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja pada variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, dan Kebebasan Berkeyakinan; Hak Memilih dan Dipilih; serta Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peran Peradilan yang Independen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.12
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2011-2017

No.	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Kebebasan Sipil	84,05	75,03	79,18	87,87	79,44	66,06	69,07
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	51,88	81,88	35,00	91,25	92,97	12,50	6,25
	2. Kebebasan Berpendapat	74,97	47,20	61,09	76,12	72,89	75,70	61,82
	3. Kebebasan Berkeyakinan	86,44	75,22	81,31	87,06	71,58	66,51	81,54
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	93,05	82,75	96,53	93,23	96,43	80,03	63,53

No.	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	Hak-Hak Politik	46,29	46,29	46,29	67,08	67,28	67,24	67,24
	1. Hak Memilih dan Dipilih	42,59	42,59	42,59	84,16	84,57	84,48	84,48
	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
III.	Lembaga Demokrasi	73,04	77,46	60,89	80,77	61,48	66,69	78,82
	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	94,94	94,94	94,94	86,71	86,71	86,71	86,71
	2. Peran DPRD	69,48	41,01	43,32	43,22	46,75	50,50	79,74
	3. Peran Partai Politik	98,06	100,00	100,00	99,96	48,49	74,29	100,00
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	80,30	80,30	80,30	98,48	30,13	27,43	83,16
	5. Peran Peradilan yang Independen	32,50	75,00	0,00	75,00	100,00	100,00	50,00
	Skor IDI	65,59	65,59	63,79	60,84	69,75	66,71	70,85

Sumber : BPS, 2018

c) Pembinaan LSM, Ormas dan OKP

Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2013-2018 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana pada Tabel 2.11

Tabel 2.13
Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018

No.	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sarasehan antar etnis serta akulturasi budaya	4	3	2	2	2	3	2
2.	Sarasehan pendayagunaan Ormas	2	2	2	4	5	5	9
3.	Sarasehan pengkajian pemeliharaan dan pengembangan kesenian serta budaya daerah	2	1	1	10	6	7	7
4.	Peningkatan peran politik Ormas/ LSM/Toga/Toma	4	3	3	6	5	5	6
	JUMLAH	12	12	8	22	18	20	24

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2018

Kerukunan Umat Beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu tingkat kerukunan umat beragama di Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Indeks	Tahun									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Toleransi	-	-	-	-	-	-	-	-	73,9	Rukun
2	Kesetaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	73,1	Rukun
3	Kerjasama	-	-	-	-	-	-	-	-	74,2	Rukun
Skor IKUB JATENG		-	-	-	-	76,5	Rukun	77,6	Rukun	73,73	Rukun
Skor Nasional		-	-	-	-	-	-	-	-	72,27	Rukun
Peringkat										13	

Sumber : Kanwil Kemenag Jateng, 2018

Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun periode Renstra OPD Tahun 2013-2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Program ini diarahkan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yaitu : pelaksanaan koordinasi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; KOMINDA; pengawasan terhadap orang asing; koordinasi pengamanan wilayah; pembinaan sosial politik serta pengkajian dan pemantauan dampak perekonomian terhadap kondusivitas wilayah; fasilitasi pembinaan ketentraman masyarakat; monitoring dan pendataan daerah rawan konflik gangguan keamanan dan ketertiban; simulasi penanganan huru-hara dan unjuk rasa serta dialog pengelolaan pendapat umum terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil yang dicapai adalah:

- Tertanganinya 72 kasus kerawanan sosial politik.
- Tersedianya data/informasi daerah untuk antisipasi potensi kerawanan konflik di 35 kabupaten/kota.
- Meningkatnya kemampuan 630 petugas pengamanan obyek vital (Pam Obvit) Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi penjagaan dan pengamanan aset-aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Terlaksananya koordinasi pengamanan wilayah dengan kabupaten/kota dan aparat keamanan.
- Terselenggaranya 18 kali Rakor PAM wilayah kabupaten/kota bagi 1.215 orang aparaturnya keamanan.
- Terselenggaranya dialog pengelolaan pendapat umum terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Diperolehnya peta daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini diarahkan untuk program meningkatkan wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang dilaksanakan dengan kegiatan, antara lain : peningkatan kesadaran bela negara; peningkatan pemahaman ideologi negara, pemeliharaan solidaritas dan kesetupaduan masyarakat serta akulturasi budaya serta fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan pendidik.

Hasil yang dicapai antara lain :

- a. Adanya peningkatan kesadaran bela negara bagi 1.560 orang.
- b. Pemeliharaan solidaritas dan kesetupaduan masyarakat serta akulturasi budaya sebanyak 1.545 orang.
- c. Deklarasi gerakan perwujudan Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila.
- d. Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental

3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini diarahkan untuk memperkuat pengembangan wawasan kebangsaan melalui pemberdayaan potensi ormas, pemeliharaan hubungan etnisitas dengan negara untuk mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: peningkatan apresiasi nilai-nilai kebangsaan melalui pagelaran seni dan budaya daerah; pendayagunaan potensi organisasi kemasyarakatan; pemeliharaan hubungan etnisitas dengan negara; penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparaturnya dan elemen masyarakat serta etika, budaya politik dalam kerangka penguatan wasbang dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar.

Hasil yang dicapai adalah :

- a. Terselenggaranya fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 60 kali.
- b. Meningkatnya kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial bagi 355 orang.
- c. Terlaksananya Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi (Forkomkon) penanganan ketentraman ketertiban umum sebanyak 6 kali.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program ini diarahkan untuk mengantisipasi konflik sosial dan deteksi dini potensi konflik dengan melalui kegiatan : Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial, Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat di Jawa Tengah.

Hasil yang dicapai adalah :

- a. Terselenggaranya kegiatan Rakorda FKDM di Jawa Tengah.
- b. Terdidiknya kader deteksi dini konflik sosial.
- c. Terdidiknya tokoh masyarakat dan tokoh agama dasar-dasar mediasi non legitasi
- d. Deteksi dini potensi konflik sosial masyarakat.

5. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan penguatan

peran Ormas/LSM dan tomas/toga; penguatan potensi politik masyarakat; pendidikan politik bagi elemen masyarakat; Pemantauan dan pendataan parpol di daerah serta penguatan sistem dan implementasi pemilukada.

Hasil yang dicapai adalah :

- a. Terselenggaranya peningkatan dan penguatan peran politik bagi 1.185 orang.
- b. Pendidikan politik bagi elemen masyarakat 2.045 orang.
- c. Pendidikan politik bagi kaum perempuan sebanyak 1.200 orang.

Tabel 2.15
Gambaran Kinerja Pelayanan OPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan																		
1	Kondusivitas Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Tengah (Kab/Kota)	-	-	-	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	100	100	100	100	100
B	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																		
1	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negaranilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (Kab/Kota)	-	-	-	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	100	100	100	100	100
C	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan																		
1	Meningkatnya kapasitas aparaturn kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan (jumlah aparaturn kesbangpol)	-	-	-	300	320	340	360	380	335	520	360	500	480	111	162	105	138	126,3
D	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan																		
1	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Jawa Tengah	-	-	-	80	85 %	90	95	100	100	100	100	100	100	125	117	111	105	100
E	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat																		
1	Persentase Hak Pilih Dalam Pileg	-	-	-	75,00	-	-	-	-	74,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	Persentase Hak Pilih Dalam Pilpres	-	-	-	75,00	-	-	-	-	71,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Hak Pilih Dalam Pilgub	-	-	-	-	-	-	-	75,00	-	-	-	-	73,19	-	-	-	-	97,59
4	Persentase Hak Pilih Dalam Pilkada	-	-	-	66,52	68,64	-	72,88	75,00	-	65,21	-	79,79	77,40	-	95,00	-	109,4	103,2
5	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	-	-	-	67,48	68,11	68,74	70,25	70,50	77,44	69,75	66,71	70,85	-	114,7	102,4	97,04	100,8	-

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2018

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Prov. Jateng Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	12.889.235	15.105.787	15.191.173	11.707.674	11.018.452	11.265.631	14.384.003	13.922.193	11.104.867	10.603.481	87,40	95,22	91,64	94,85	96,23	13.182.464	12.256.035
Belanja Langsung	41.894.936	43.004.167	31.912.500	24.543.885	37.519.592	39.392.269	39.747.823	30.595.654	23.577.220	35.832.397	94,02	92,42	95,87	96,06	95,50	35.775.016	33.829.097
TOTAL	54.784.171	58.109.954	47.103.673	36.251.559	48.538.044	50.658.900	54.131.826	44.517.487	34.682.087	46.435.879	92,46	93,82	93,75	95,45	95,67	48.957.480	46.085.235

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2018

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
4. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.
5. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang bisa menghambat proses

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

1. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan antar Provinsi yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
5. Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.

6. Kondisi geografis di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah, seperti daerah pegunungan, kepulauan luar, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
7. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
8. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum.
9. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pilukada serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD;
- b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat;
- c. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan misi kepala daerah Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 yaitu **“Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”** khususnya misi ke-1 terkait pembangunan masyarakat Jawa Tengah religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
- d. Adanya peluang dukungan dana dari APBD, APBN serta lembaga donor lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:
 - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
 - b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
 - c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
2. Bidang Ketahanan Bangsa:
 - a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
 - b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
 - c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
 - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
 - e. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
3. Bidang Politik Dalam Negeri :
 - a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional.
 - c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
			Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umar beragama/penghayat kepercayaan
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial
			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
			Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2018-2023) dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: **"Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**

Dari visi tersebut maka ada kesesuaian antara visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD dengan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif"**, khususnya indikator penjabaran visi Sejahtera, yaitu kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi dan politik, terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, saling bantu membantu, saling pengertian dan *tepo sliro* dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan kedalam empat (4) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Sedangkan dari penjabaran misi tersebut kemudian dituangkan dalam Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari 10 (sepuluh) Program Kerja antara lain :

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah, dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM penguatan BUMDes dan pelatihan start up untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta, dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian intergrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB, dan bantuan sekolah swasta, pondok pesatren, madrasah, dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan keperdulian lingkungan;

Dari Misi yang tertuang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara langsung dan tidak langsung mendukung semua Misi yang tercantum, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;**

Dalam mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan instansi terkait untuk meredam segala tindakan konflik SARA untuk menciptakan kehidupan Masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman.

b. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;

Reformasi Birokrasi yang tercermin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melalui dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik yang responsif dalam menangani aduan dan persoalan di masyarakat. Hal tersebut didukung dengan pelayanan publik yang mudah, murah, serta cepat didukung dengan inovasi dan teknologi informasi melalui media sosial.

c. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;

Program penurunan angka kemiskinan diterjemahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak dan kesenjangan ekonomi yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik di daerah. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat mengatasi akan segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Dalam membentuk Masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pendidikan baik mengenai kehidupan berdemokrasi, politik, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, rasa cinta tanah air dan kehidupan bertoleransi antar umat beragama.

Kemudian, dari Program Kerja yang tercantum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tupoksinya termasuk dalam Program Kerja ke-1, ke-2, ke-3 ke-5 dan ke-10 yaitu :

a. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;

Selama ini telah dilaksanakan pendidikan terkait demokrasi dan politik terhadap seluruh elemen masyarakat mulai dari Ormas/LSM, Toma/Toga, Aparatur Pemerintah, Pemuda dan Pelajar dan lain-lain.

b. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah, dan guru ngaji;

Fasilitasi pendakwah dan guru ngaji telah dilibatkan dalam partisipasi mengikuti Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

- c. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi;**
Komunikasi dan Koordinasi bersama Kesbang Kab/Kota telah terintegrasi dalam sistem layanan yang terpadu, sehingga segala bentuk laporan situasi kondisi di daerah dapat dianalisis dan dicegah secara deteksi dini terhadap konflik dan persoalan di daerah.
- d. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM penguatan BUMDes dan pelatihan start up untuk wirausahawan muda;**
Peningkatan Ketahanan Ekonomi tidak hanya dalam bentuk sosialisasi terkait dengan mencegah akan dampak dan kesenjangan ekonomi namun kedepannya akan dilakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan pelatihan kepada wirausahawan muda untuk dapat memperluas akses dan membuka lapangan kerja baru.
- e. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan;**
Pagelaran Seni yang telah dilaksanakan merupakan cerminan dari festival budaya untuk mengenalkan masyarakat akan pentingnya budaya yang dimiliki. Bentuk lain seperti napak tilas terhadap sejarah perjuangan bangsa termasuk cara untuk lebih memahami akan perjuangan para pahlawan merupakan budaya akan cinta terhadap tanah air.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tupoksinya, mengambil fokus dalam membantu mewujudkan Misi ke-1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu : "**Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI**" dengan cara mewujudkan wilayah Jawa Tengah yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI. Untuk itu cara pengukuran yang tepat adalah melalui Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks Kebebasan Sipil), Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks Toleransi) dan Indeks Ketahanan Nasional (Indeks Ketahanan Sosial Budaya) dengan target capaian pada Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Usulan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			Tujuan dan Sasaran		2017/2018		2019	2020	2021	2022	2023	
					2017	2018						
Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	Membangun Masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran dan guyup		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	73,7	NA	74,5	75,2	76,0	76,8	77,8	77,8
			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	70,85	NA	71,10	71,35	71,60	71,85	72,10	72,10
			Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,89	NA	2,90	3,07	3,18	3,29	3,41	3,41
		Terbentuknya Masyarakat Jawa Tengah yang semakin Religius	Indeks Toleransi	Angka	73,9	NA	74,4	74,48	75,3	75,9	76,6	76,6
		Terbentuknya Masyarakat Jawa Tengah yang semakin Toleran dan Guyup	Indeks Kebebasan Sipil	Angka	69,07	NA	69,25	69,35	69,50	69,75	70,50	70,50
			Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Angka	3,01	NA	3,03	3,04	3,05	3,06	3,07	3,07

Tabel 3.3
Telaah Visi, Misi dan Program KDH

No (1)	Visi/Misi/Program Kerja KDH (2)	Tupoksi PD (3)	Permasalahan (4)	Faktor Penghambat dan Pendorong (5)
1.	Visi :			
	"Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Menurunnya wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan bela negara	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya apatisme terhadap pemerintahan 2. Rendahnya partisipasi masyarakat 3. Potensi Konflik Sosial akibat SARA dan dampak tekanan ekonomi 4. Menurunnya sikap gotong-royong, tepo sliro dan saling menghargai <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Prov. Jateng 2. Meningkatnya kualitas apatur pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 4. Meningkatnya peran forum, ormas/LSM
1.1	Misi :			
	a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;	Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideology dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri lingkup provinsi dan kab/kota	Meningkatnya isu SARA melalui medsos menimbulkan potensi perilaku intoleransi serta menurunkan tenggang rasa dan gotong royong	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya daya literasi masyarakat 2. Lunturnya tradisi masyarakat (musyawarah, gotong royong) 3. Kurangnya pendidikan politik masyarakat

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Faktor Pendorong : 1. Peningkatan peran forum dan ormas/LSM 2. Kemudahan akses hubungan dengan pemerintahan 3. Peningkatan keterbukaan informasi publik
	b. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya , dan mencintai lingkungan;	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik	Faktor penghambat : 1. Masuknya budaya dan ideologi asing akibat globalisasi dan kemudahan akses internet 2. Kurangnya daya literasi masyarakat 3. Menurunnya pelestarian budaya dan tradisi local Faktor Pendukung : 1. Meningkatnya peran ormas/LSM 2. Kemudahan akses informasi dan komunikasi
1.1.1	Program Kerja :			
	a. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu , gender, anti korupsi, dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;	Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri di lingkup provinsi dan kab/kota	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik	Faktor Penghambat : 1. Menurunnya karakter bangsa dan pergeseran nilai budaya masyarakat 2. Kurangnya daya literasi masyarakat Faktor Pendukung : 1. Meningkatnya peran ormas/LSM 2. Kemudahan akses informasi dan komunikasi
	b. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah, dan guru ngaji ;	Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan,	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik	Faktor Penghambat : 1. Menurunnya karakter bangsa dan pergeseran nilai budaya masyarakat

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ketahanan bangsa, politik dalam negeri di lingkup provinsi dan kab/kota		<p>2. Kurangnya daya literasi masyarakat</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>1. Meningkatnya peran ormas/LSM</p> <p>2. Kemudahan akses informasi dan komunikasi</p>
	c. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan;	Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri di lingkup provinsi dan kab/kota	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik	<p>Faktor Penghambat :</p> <p>1. Menurunnya karakter bangsa dan pergeseran nilai budaya masyarakat</p> <p>2. Kurangnya daya literasi masyarakat</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>1. Meningkatnya peran ormas/LSM</p> <p>2. Kemudahan akses informasi dan komunikasi</p>

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan Visi dan Misi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019 yang tercantum dalam Visi yaitu : Memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis, yang diwujudkan melalui pelaksanaan 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintahan nasional dan daerah dalam merespon, memfasilitasi, membina, mengawasi sebagai sarana konsolidasi, membangun kesamaan persepsi dan bahan pengembangan kebijakan terkait urusan politik dan pemerintahan umum;
2. Mendorong pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen bangsa untuk memelopori revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI;
3. Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019;

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten/Kota, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Kesbangpol Kab/Kota sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Provinsi yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Kesbangpol Kab/Kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan

kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, telaah visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Jawa Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Kondusivitas Wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;
2. Toleransi : Penguatan kerukunan antar umar beragama dalam menjaga ketahanan bangsa;
3. Demokrasi : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” **Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik**”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa
- b. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik		A. Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%
a.		Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	1. Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%
b.		Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	2. Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%

Untuk tujuan dan sasaran ,serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Kesekretariatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	-	-	60	65	70	75	80	80
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Nilai Kepuasan Masyarakat	-	-	60	65	70	75	80	80
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2. Nilai SAKIP PD	-	61,44	63,19	65,44	68,69	73,19	78,44	78,44

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
3. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
5. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan
6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang

ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemetaan Politik, potensi ketahanan bangsa dan potensi kerawanan konflik;
2. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur;
3. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainya hingga kab/kota;
4. Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;
5. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;
6. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);
7. Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara;
8. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
9. Sosialisasi UU tentang Ormas, Pemilu dan lain-lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif;
10. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas);
11. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat;
12. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Mewujudkan Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa Dan Politik	A. Meningkatkan jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	a. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur	
			b. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainya hingga kab/kota;	
			c. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;	
			d. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat.	
			2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini;	e. Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara;
				3. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FPBI, FKPT, FKDM, PPWK, Tim Pora dan Timdu PKS;
	B. Meningkatkan jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	4. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif	g. Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;	
			h. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);	
			i. Pemetaan Politik, potensi daerah dan potensi kerawanan konflik;	
			j. Sosialisasi UU tentang Ormas dan UU tentang Pemilu secara terstruktur, intensif dan komprehensif;	
			k. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas)	

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Urusan Kesekretariatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	A. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan	a. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
	B. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	b. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 terdapat 5 (lima) Program, sebagaimana berikut :

1. Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan

Indikator kinerja program atau outcome adalah presentase penanganan kejadian terkait konflik sosial, presentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini, dan presentase masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan Wasbang, serta dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut:

a. Penanganan Konflik Sosial

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah laporan konflik sosial, jumlah laporan konflik yang tertangani, jumlah masyarakat yang ikut dalam penyelesaian konflik sosial, dan jumlah pemetaan / mapping potensi konflik sosial.

b. Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini

Indikator keluaran dan kegiatan ini adalah jumlah kunjungan VIP / VVIP tertangani, jumlah dukungan pengamanan pemilu, jumlah unjuk rasa tertangani, jumlah pantauan orang asing, jumlah laporan deteksi dini, dan jumlah kader resolusi konflik yang terbentuk.

c. Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Indikator keluaran dan kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila, jumlah masyarakat yang paham Wasbang dan nilai – nilai sejarah perjuangan bangsa, jumlah kader Pancasila yang terbentuk, jumlah kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk, dan jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk, jumlah masyarakat yang mengikuti Apel Kebangsaan.

d. Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan

Indikator keluaran dan kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan, jumlah masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan Karakter Bangsa dan Ideologi Pancasila dan jumlah pengendalian capaian program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan.

2. Program Penguatan Ketahanan Bangsa

Indikator kinerja program atau outcome adalah persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Penguatan Ketahanan Ekonomi

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi / pembinaan Monev Bidang Ketahanan Ekonomi, jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, jumlah kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang ketahanan ekonomi, dan jumlah kajian strategik atas pemetaan / mapping kondisi ketahanan bangsa di Jawa Tengah.

b. Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah, jumlah pembinaan Etnis Dengan Negara, jumlah pembinaan dalam rangka harmonisasi dan kerukunan antar etnis serta akulturasi budaya dan jumlah pembinaan dan pengembangan penguatan generasi muda lintas etnis.

c. Penguatan Toleransi Umat Beragama dan Pemberdayaan Ormas

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, jumlah orang yang difasilitasi pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

d. Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Ketahanan Bangsa

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang terlibat dalam pembinaan ketahanan ekonomi, jumlah masyarakat yang terlibat dalam pembinaan ketahanan masyarakat, jumlah pengendalian capaian program penguatan ketahanan bangsa.

3. Program Penguatan Politik Dalam Negeri

Indikator kinerja program atau outcome adalah persentase masyarakat yang paham terhadap aspek – aspek IDI, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang ikut pendidikan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45, jumlah masyarakat yang ikut sosialisasi penanganan dampak pemilu / pilkada, jumlah kader partai politik yang terdidik, dan jumlah masyarakat yang ikut sosialisasi sistem dan implementasi pemilu/pilkada.

b. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pemilih pemula yang ikut pendidikan politik, jumlah ormas dan toma / toga yang ikut penguatan peran politik, jumlah fasilitasi forkopimda, hasil pendataan parpol, jumlah parpol yang terlibat dalam pelatihan penatausahaan bantuan keuangan parpol, jumlah pengembangan demokrasi di Jawa Tengah.

c. Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Politik Dalam Negeri

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan demokrasi, jumlah masyarakat yang terlibat dalam pembinaan dan peningkatan

partisipasi politik, dan jumlah pengendalian capaian program penguatan politik dalam negeri.

4. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja program atau outcome adalah persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan perangkat daerah (jenis).
- b. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah.
- d. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan pelayanan perkantoran perangkat daerah.
- f. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah.
- g. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan tepenuhinya penyediaan makan, minum rapat perangkat daerah.
- h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan / Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan / buku perpustakaan perangkat daerah.
- i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Gedung Kantor / Kendaraan Dinas / Operasional Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan / rumah dinas / gedung kantor / kendaraan dinas / operasional perangkat daerah.

- j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin / berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah.
- k. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah.
- l. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan.
- m. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah unit pakaian dinas yang diadakan.
- n. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mengikuti diklat / workshop / bintek / seminar.
- o. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah laporan informasi publik perangkat daerah.
- p. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah.

5. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja program atau outcome adalah persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun.
- b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Kesbangpol
Indikator keluaran dari kegiatan ini jumlah masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan, jumlah masyarakat yang terlibat dalam ketahanan bangsa, jumlah masyarakat yang terlibat dalam pembinaan politik dalam negeri, jumlah capaian program dan kegiatan dalam perencanaan, pengendalian dan pembinaan kesbangpol.

6.2 Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

Terlampir

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Tengah 2018 – 2023 tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menentukan Indikator Kinerja Utama OPD yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana tabel terlampir.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	A. Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%
	a) Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%
	b) Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%

Dari Indikator Kinerja Utama OPD, kemudian dirumuskan kembali sesuai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD yang termuat dalam Indikator Program, sebagaimana tabel terlampir,

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%
3.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Wasbang	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%
	Program Penguatan Ketahanan Bangsa			80%	81%	83%	86%	90%	90%
4.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Bangsa	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%
	Program Penguatan Politik Dalam Negeri			80%	81%	83%	86%	90%	90%
5.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Aspek-Aspek IDI			80%	81%	83%	86%	90%	90%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.

Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Jawa Tengah. Semua target dari capaian yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pastinya akan tercapai dengan dukungan pihak-pihak terkait.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terima kasih.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)					
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa			Persentase Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	75%	75%	80%		81%		83%		86%		90%					Badan Kesbangpol			
				Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	75%	75%	80%		81%		83%		86%		90%					71.920.263	Badan Kesbangpol		
			A.	Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan						31.220.263		9.500.000		10.250.000		11.000.000		9.950.000					
			A.1.	Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					Badan Kesbangpol	
			1.	Penanganan Konflik Sosial	1.1.	Jumlah laporan konflik sosial			3	349.300	3	500.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000	15	2.349.300	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					1.2.	Jumlah laporan konflik yang tertangani.			126	1.202.500	150	400.000	150	440.000	150	450.000	150	400.000	726	2.892.500	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					1.3.	Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial.			280	313.200	400	550.000	500	650.000	600	750.000	400	550.000	2.180	2.813.200	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					1.4.	Jumlah Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial			1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1.500.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
						Total Anggaran Kegiatan				2.165.000		1.750.000		1.890.000		2.000.000		1.750.000		9.555.000			
					A.2.	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini	75%	75%	80%		81%		83%		86%		90%					Badan Kesbangpol	
			2.	Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	2.1.	Jumlah kunjungan VIP/VVIP tertangani			8	1.388.550	20	1.310.000	20	1.310.000	20	1.310.000	20	1.310.000	88	6.628.550	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					2.2.	Jumlah Dukungan Pengamanan Pemilu			1	140.300	21	500.000	-	-	7	500.000	35	1.000.000	64	2.140.300	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					2.3.	Jumlah Unjuk rasa tertangani			300	100.000	300	100.000	350	150.000	300	100.000	300	100.000	1.550	550.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					2.4.	Jumlah pantauan orang asing.			5.200	194.100	6.000	485.000	6.500	500.000	6.500	500.000	6.000	485.000	30.200	2.164.100	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					2.5.	Jumlah laporan deteksi dini			12	142.720	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	60	2.142.720	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					2.6.	Jumlah Kader Resolusi Konflik Yang Terbentuk			1.100	619.330	1.100	600.000	1.800	1.000.000	1.800	1.000.000	1.100	600.000	6.900	3.819.330	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
						Total Anggaran Kegiatan				2.585.000		3.495.000		3.460.000		3.910.000		3.995.000		17.445.000			
					A.3.	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wasbang	75%	75%	80%		81%		83%		86%		90%					Badan Kesbangpol	
			3.	Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	3.1.	Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila			600	834.000	900	920.000	1.350	1.375.000	1.350	1.375.000	900	870.000	5.100	5.374.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					3.2.	Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa			500	666.000	1.300	1.350.000	1.375	1.430.000	1.450	1.500.000	1.300	1.350.000	5.925	6.296.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					3.3.	Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk			150	325.000	450	600.000	475	630.000	500	670.000	450	600.000	2.025	2.825.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
			3.4.	Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang			550	340.000	600	785.000	635	830.000	670	875.000	600	785.000	3.055	3.615.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah			
			3.5.	Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk			250	325.000	450	600.000	475	635.000	500	670.000	450	600.000	2.125	2.830.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah			
			3.6.	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Apel Kebangsaan			130.000	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	22.000.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah			
				Total Anggaran Kegiatan				24.490.000		4.255.000		4.900.000		5.090.000		4.205.000		42.940.000					
	4.	Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan	4.1.	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan			160	1.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	160	1.175.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				4.2.	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan Karakter Bangsa dan Ideologi Pancasila			300	500.000	-	-	-	-	-	-	-	300	500.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah		
				4.3.	Jumlah Pengendalian Capaian Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan			35	305.263	-	-	-	-	-	-	-	35	305.263	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah		
				Total Anggaran Kegiatan					1.980.263									1.980.263				
				B. Program Penguatan Ketahanan Bangsa					5.860.000				7.110.000				8.210.000		35.650.000			
				B.1.	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa	75%	75%	80%		81%		83%		86%		90%			Badan Kesbangpol			
			1.	Penguatan Ketahanan Ekonomi	1.1.	Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi			105	315.000	70	315.000	70	315.000	70	315.000	385	1.575.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah		
					1.2.	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi			770	900.000	1.350	1.300.000	1.450	1.400.000	1.500	1.500.000	1.500	1.500.000	6.570	6.600.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
					1.3.	Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi			-	-	20	950.000	30	1.275.000	40	1.600.000	40	1.600.000	130	5.425.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
					1.4.	Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah			6	585.000	7	705.000	8	805.000	9	955.000	9	955.000	39	4.005.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
				Total Anggaran Kegiatan					1.800.000			3.270.000		3.795.000		4.370.000		4.370.000		17.605.000		
			2.	Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas	2.1.	Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah			49	330.000	49	330.000	55	430.000	55	500.000	55	500.000	263	2.090.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
					2.2.	Jumlah Pembinaan Etnis dengan Negara			160	223.000	240	323.000	240	323.000	240	323.000	240	303.000	1.120	1.495.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
					2.3.	Jumlah Pembinaan Dalam Rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya			160	100.000	480	590.000	400	515.000	560	670.000	560	670.000	2.160	2.545.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
					2.4.	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis			160	100.000	240	200.000	320	300.000	400	400.000	400	400.000	1.520	1.400.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
				Total Anggaran Kegiatan					753.000			1.443.000		1.568.000		1.893.000		1.873.000		7.530.000		
			3.	Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas.	3.1.	Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan			320	550.000	400	650.000	400	650.000	400	650.000	400	650.000	1.920	3.150.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
					3.2.	Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi			160	152.000	240	252.000	240	252.000	240	252.000	240	272.000	1.120	1.180.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
					3.3.	Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan			320	745.000	320	745.000	420	845.000	520	945.000	620	1.045.000	2.200	4.325.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
				Total Anggaran Kegiatan					1.447.000			1.647.000		1.747.000		1.847.000		1.967.000		8.655.000		
			4.	Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Ketahanan Bangsa	4.1.	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Ekonomi			500	850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	850.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					4.2.	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Masyarakat			440	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
					4.3.	Jumlah Pengendalian Capaian Program Penguatan Ketahanan Bangsa			35	260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
				Total Anggaran Kegiatan					1.860.000										1.860.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)					
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
2. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	C. Program Penguatan Politik Dalam Negeri			Persentase masyarakat yang paham terhadap Politik	75%	75%	80%		81%		83%		86%		90%					Badan Kesbangpol			
								9.935.000		10.435.000		11.185.000		13.685.000		14.085.000			59.325.000				
				C.1	Persentase masyarakat yang paham terhadap Aspek-Aspek IDI	75%	75%	80%		81%		83%		86%		90%					Badan Kesbangpol		
		1.	Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik	1.1.	Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD'45			1.800	1.251.863	3.200	2.100.000	3.200	2.600.000	4.200	3.600.000	4.200	3.600.000	16.600	13.151.863	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah		
				1.2.	Jumlah Masyarakat yang ikut Sosialisasi Penanganan dampak Pemilu/Pilkada			210	900.000	550	1.311.000	600	1.332.863	600	1.332.863	600	1.332.863	2.560	6.209.589	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah		
				1.3.	Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik			300	485.171	500	550.000	300	485.171	360	500.000	500	800.000	1.960	2.820.342	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah		
				1.4.	Jumlah Masyarakat Yang Ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada			400	512.966	600	600.000	400	512.966	480	580.000	600	850.000	2.480	3.055.932	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah		
					Total Anggaran Kegiatan				3.150.000		4.561.000		4.931.000		6.012.863		6.582.863		25.237.726				
				2.	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik	2.1.	Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik			1.300	1.156.000	3.300	2.300.000	3.300	2.800.000	4.400	3.800.000	4.400	3.800.000	16.700	13.856.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
						2.2.	Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik			80	82.000	240	182.000	80	82.000	480	500.137	480	310.137	1.360	1.156.274	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
						2.3.	Jumlah Fasilitasi Forkopimda			500	2.260.000	500	2.260.000	500	2.260.000	500	2.260.000	500	2.260.000	2.500	11.300.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
						2.4.	Hasil Pendataan Parpol			35	200.000	35	200.000	35	200.000	35	200.000	35	200.000	175	1.000.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
						2.5.	Jumlah Parpol yang terlibat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan			400	532.000	400	532.000	400	532.000	400	532.000	400	532.000	2.000	2.660.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
						2.6.	Jumlah Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah			200	345.000	400	400.000	400	380.000	400	380.000	500	400.000	1.900	1.905.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
					Total Anggaran Kegiatan				4.575.000		5.874.000		6.254.000		7.672.137		7.502.137		31.877.274				
		3.	Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Politik Dalam Negeri	3.1.	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Demokrasi			400	850.000	-	-	-	-	-	-	-	400	850.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah			
				3.2.	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Politik			290	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	290	1.050.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah			
				3.3.	Jumlah Pengendalian Capaian Program Penguatan Politik Dalam Negeri			35	310.000	-	-	-	-	-	-	-	35	310.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah			
			Total Anggaran Kegiatan				2.210.000		-		-		-		-		2.210.000						
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai Kepuasan Masyarakat	0%	0%	60%		65%		70%		75%		80%		80%		Badan Kesbangpol	Jawa Tengah			
				Nilai Kepuasan Masyarakat	0%	0%	60%		65%		70%		75%		80%		80%		Badan Kesbangpol	Jawa Tengah			
			A.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah					5.825.000		5.768.000		6.273.000		5.643.000		6.443.000		29.952.000				
			A.1.	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
			1.	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.1.	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah (jenis)	12	12	12	231.000	12	231.000	12	231.000	12	231.000	12	231.000	60	1.155.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
				Total Anggaran Kegiatan					231.000		231.000		231.000		231.000		231.000		1.155.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	(18)	(19)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	2.1. Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah.	12	12	12	7.000	12	7.000	12	7.000	12	7.000	12	7.000	60	35.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			Total Anggaran Kegiatan				7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		35.000			
			3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah	3.1. Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah.	12	12	12	350.000	12	400.000	12	400.000	12	400.000	12	400.000	60	1.950.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			Total Anggaran Kegiatan				350.000		400.000		400.000		400.000		400.000		1.950.000			
			4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	4.1. Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah.	12	12	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	60	400.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			Total Anggaran Kegiatan				80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		400.000			
			5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	5.1. Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan pelayanan perkantoran perangkat daerah.	12	12	12	1.583.000	12	2.100.000	12	2.100.000	12	2.100.000	12	2.100.000	60	9.983.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			Total Anggaran Kegiatan				1.583.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		9.983.000			
			6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	6.1. Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah.	12	12	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	60	1.250.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			Total Anggaran Kegiatan				250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		1.250.000			
			7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	7.1. Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan, minum rapat perangkat daerah.	12	12	12	90.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000	60	450.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			Total Anggaran Kegiatan				90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		450.000			
			8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan / Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	8.1. Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan / buku perpustakaan perangkat daerah.	12	12	12	25.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	60	125.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			Total Anggaran Kegiatan				25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		125.000			
			9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Gedung Kantor / Kendaraan Dinas / Operasional Perangkat Daerah	9.1. Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan / rumah dinas / gedung kantor / kendaraan dinas / operasional perangkat daerah.	12	12	12	1.864.000	12	1.030.000	12	1.030.000	12	1.030.000	12	1.030.000	60	5.984.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			Total Anggaran Kegiatan				1.864.000		1.030.000		1.030.000		1.030.000		1.030.000		5.984.000			
			10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	10.1. Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin / berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah.	12	12	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	60	1.500.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			Total Anggaran Kegiatan				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		1.500.000			
			11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.1. Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah.	1	1	1	240.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	640.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			Total Anggaran Kegiatan				240.000		100.000		100.000		100.000		100.000		640.000			
			12. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	12.1. Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan.	-	-	-	-	5	125.000	2	700.000	-	-	2	800.000	9	1.625.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			Total Anggaran Kegiatan				-		125.000		700.000		-		800.000		1.625.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			13. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	13.1. Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan.	-	-	-	-	100	70.000	-	-	100	70.000	100	70.000	300	210.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
			Total Anggaran Kegiatan					-		70.000			-		70.000		70.000		210.000		
			14. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	14.1. Jumlah ASN yang mengikuti diklat / workshop / bintek / seminar.	240	240	240	445.000	240	600.000	240	600.000	240	600.000	240	600.000	1.200	2.845.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
			Total Anggaran Kegiatan					445.000		600.000		600.000		600.000		600.000		2.845.000			
			15. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	15.1. Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah.	1	1	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000	5	300.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
			Total Anggaran Kegiatan					60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		300.000			
			16. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.1. Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	12	12	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	60	1.500.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
			Total Anggaran Kegiatan					300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		1.500.000			
			2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				0%		0%			0%		0%		0%		0%	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			B. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.160.000		7.900.000		6.750.000		7.280.000		9.000.000		32.090.000			
			B.1. Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD		100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Badan Kesbangpol	Jawa Tengah
			1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun.	10			555.000	10	700.000	10	600.000	10	650.000	10	800.000	50	3.305.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
			Total Anggaran Kegiatan					555.000		700.000		600.000		650.000		800.000		3.305.000			
			2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.1. Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.			10	605.000	10	800.000	10	750.000	10	780.000	10	900.000	50	3.835.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
			Total Anggaran Kegiatan					605.000		800.000		750.000		780.000		900.000		3.835.000			
			3. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Kesbangpol	3.1. Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan			-	-	1.700	1.900.000	1.800	1.500.000	1.900	1.700.000	2.000	2.200.000	7.400	7.300.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
				3.2. Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa			-	-	1.000	1.800.000	1.100	1.850.000	1.200	1.800.000	1.300	1.900.000	4.600	7.350.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
				3.3. Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri			-	-	2.500	2.400.000	2.000	1.850.000	1.800	2.100.000	3.200	2.800.000	9.500	9.150.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
				3.4. Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol			-	-	35	300.000	35	200.000	35	250.000	35	400.000	140	1.150.000	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah	
			Total Anggaran Kegiatan					-		6.400.000		5.400.000		5.850.000		7.300.000		24.950.000			

54.000.263

39.963.000

41.568.000

45.718.000

47.688.000

228.937.263